

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pidana *money politic* dalam pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD di Kota Payakumbuh oleh Bawaslu beserta jajarannya, Kepolisian, dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu, serta Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Pertimbangan Hakim dalam memutus Terdakwa bersalah dikonstruksikan dengan menghubungkan fakta-fakta persidangan, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 274 *juncto* Pasal 84 ayat (1) huruf j *juncto* Pasal 87 huruf d Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008, dimana perbuatannya sebagai pelaksana kampanye yang memberikan “materi lainnya” telah memenuhi unsur ketentuan pidana pemilu tersebut.
3. Terungkapnya kasus pelanggaran pidana *money politic* dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 di Kota Payakumbuh bukan karena bagusya budaya hukum (*legal culture*) masyarakat, melainkan karena dipengaruhi oleh faktor kepentingan politik dan hukum dari pihak Pelapor terhadap pelanggaran ketentuan pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat merugikan dari pihak Pelapor sebagai salah satu calon anggota

DPRD Kota Payakumbuh pada daerah pemilihan yang sama. Namun demikian struktur hukum (*legal structure*) sebagai sub-sistem dari keseluruhan sistem pidana pemilu dalam pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD di Kota Payakumbuh telah menjalankan fungsinya dengan baik sehingga telah menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran ketentuan pidana pemilu sampai ke pengadilan.

B. Saran

1. Perlu peningkatan sinerjitas Bawaslu beserta jajarannya, Kepolisian, dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu dalam melakukan kajian indikasi adanya pelanggaran pidana pemilu, sehingga fungsi penegakan hukum pidana pemilu akan lebih efektif dan efisien.
2. Pengaturan terhadap efektivitas sistem peradilan pidana pemilu harus diperkuat dengan paradigma penegakan hukum yang mengarah kepada aspek penegakan kepastian hukum dan tertib hukum masyarakat.
3. Perlu dibangun kesadaran politik masyarakat yang pada gilirannya akan tercipta budaya hukum (*legal culture*) masyarakat untuk menciptakan Pemilu Legislatif , Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang bersih dari pelanggaran pidana *money politic* sehingga asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) akan dapat diwujudkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- A. Soetomo dalam Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busro, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003.
- , *Keterpurukan Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- , *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence); Termasuk Interpretasi Undang-undang*, Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, P.T. Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Aidul Fitriciada Azhari, *Sistem Pengambilan Keputusan Demokrasi Menurut Konstitusi*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2000.
- Amiruddin dan Zaini Bisri, *Pilkada Lansung; Problem dan Prospek*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2012.
- Arief Budiman, *Teori Negara; Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Pusat Penerbitan LPM-UNISBA, Bandung, 1995.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Basrofi dan Sudikun, *Teori-Teori Perlawanan dan Kekerasan Kolektif*, Insan Cendekia, Surabaya, 2003.
- Benny K. Harman & Hendardi, ed., *Konstitusionalisme Peran DPR dan Judicial Review*, JARIM dan YLBHI, Jakarta, 1991.
- Bondan Gunawan S., *Apa itu Demokrasi*, Sinar Harapan, Jakarta, 2007.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2004.
- D.C., Philips, *Holistic Thought in Social Science*, Stanford University Press, California, 1988.

- Dahl, Alan Robert, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1992.
- Dardji Darmodihardjo dan Shidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996
- Dedi Mulyadi, *Kebijakan Legislasi tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia dalam Perspektif Indonesia*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012.
- Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, C.V. Rajawali Pers, Jakarta, 1983.
- Diane Revitch & Abigail Thernstrom (ed), *Demokrasi Klasik & Modern – Tulisan Tokoh-tokoh Pemikir Ulung Sepanjang Masa*, Yayasan Obor Indonesia, Yogyakarta, 2005.
- Didik Supriyanto, Veri Junaidi dan Devi Darmawan, *Penguatan Bawaslu Optimalisasi Posisi, Organisasi, dan Fungsi Dalam Pemilu 2014*, Perludem, Jakarta, 2012.
- Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Pemilihan Umum*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Pembuktian Hukum Pidana*, Erlangga, Bandung, 2012.
- Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-negara Lain*, Nusa Media, Malang, 2007.
- Friedman, Lawrence M., *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, alih bahasa, M. Khozim, Nusa Media, Bandung, 2009.
- Gordon, Scott, *Controlling the State: Constitutionalism from Ancient Athens to Today*, Harvard University Press, paperback edition, 2002.
- H. R. Abdussalam dan D.P.M. Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung Jakarta, 2007.
- Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, Bumi Aksara Jakarta, 2006.
- Huntington, Samuel P., *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Grafiti, Jakarta, 1997.
- I Gede Yuliartha, *Lembaga Praperadilan dalam Perspektif Kini dan Masa Mendatang dalam Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia*, Tesis pada Universitas Diponegoro, 2009.
- Ibnu Tricahyo, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*, In Trans Publishing, Malang, 2009.
- Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman; Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Peradilan*, Setara Press, Malang, 2014.
- Indra Ismawan, *Money Politics; Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, Media Pressindo, Yogyakarta, 1999.

Internasional IDEA, *Ringkasan Buku Acuan Internasional IDEA*, alih bahasa DuaBahasa, Indonesia Printer.

Inu Kencana Syafiie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama, Bandung, 2001.

J.H. Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia Pergeseran Keseimbangan antara Individualisme dan Kolektivisme dalam Kebijakan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1980-an*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994.

-----, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, 2010.

-----, *Menuju Negara Hukum Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.

-----, *Pengantar Ilmu Hukum Tatan Negara*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Bayumedia Publishing, Malang, 2010.

Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2009.

Kementerian Hukum Dan Ham Badan Pembinaan Hukum Nasional Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Politik Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Jakarta, Desember 2010.

Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Kholid O. Santoso (Ed.), *Mencari Demokrasi Gagasan dan Pemikiran*, Segi Arsy, Bandung, 2009.

Lances Castles, *Pemilu 2004 Dalam Konteks Komparatif dan Historis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.

Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007.

Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.

Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian; Sebuah Penduan Dasar*, Gramedia, Jakarta, 2001.

Mill, John Stuart, *On Liberty (Perihal Kebebasan)*, Diterjemahkan Oleh Alex Lanur, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005.

- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Moch. Nurhasim & Ikrar Nusa Bhakti, *Sistem Presidensial & Sosol Presiden Ideal*, Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Yogyakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PSHTN FHUI, Jakarta, 1983.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, CV. Sinar Bakti, Jakarta, 1988.
- Moh. Mahfud M.D., *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- , *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- , *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 2006.
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2004.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- , *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995.
- Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis; Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2003.
- , *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, UUI Press, Yogyakarta, 2007.
- , *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Peter Mahmud Marzuki, *Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

- , *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Pfeiffer, Silke, *Vote Buying and Its Implication for Democracy: evidence from Latin America*, TI Global Report, 2004.
- Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto dan Topo Santoso, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2011.
- Ramlan Surbakti, dkk., *Merancang Sistem Politik Demokratis; Menuju Pemerintahan Presidensial yang Efektif*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2011.
- , *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Kemitraan, Jakarta, 2011.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996.
- Rumidan Rabi'ah, *Lebih Dekat dengan Pemilu di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002.
- Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010.
- , *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Schmandt, Henry J., *Filsafat Politik; Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*, alih bahasa, Ahmad Baidlowi & Imam Bahehaqi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, C.V. Utomo, Bandung, 2006.
- Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2009.
- Sjahran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1994.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007.

- , *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Sorensen, Georg, *Demokrasi dan Demokratisasi; Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah*, alih bahasa, I Made Krisna, Pustaka Pelajar, 2003.
- Strong, C.F., *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Kajian Tentang Sejarah & Bentuk-bentuk Konstitusi Dunia*, Penerbit Nuansa dengan Penerbit Nusamedia, Bandung, 2004.
- Subandi Al Marsudi, *Pancasila dan UUD 1945 Dalam Paradigma Reformasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rinneka Cipta, Edisi Baru, Jakarta, 2007.
- Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Tim Redaksi *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Tim Yappika, *Menabur Uang, Menuai Suara; Analisis Kasus Money Politics pada Pemilu 1999 di 8 Daerah Pemantauan*.
- Topo Santoso, dkk., *Penegakan Hukum Pemilu; Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*, Perludem, Jakarta, 2006.
- Topo Santoso, *Menggagas Desain Pengawasan Pemilu*, makalah disampaikan pada seminar Evaluasi Pengawasan Pemilu 2009 kerja sama KMPP-Yayasan Tifa, Jakarta 6 Agustus 2009.
- , *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Umaruddin Masdar, dkk., *Mengasah Naluri Publik Memahami Nalar Politik*, LkiS dan The Asia Foundation, Yogyakarta, 1999.
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1962.
- Veri Junaidi, *Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*, Perludem Bekerjasama dengan The Asia Foundation, 2013.
- W. Friedman, *Teori Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problem Keadilan*, alih bahasa, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Yudi Latif, *Negara Paripurna; Historis, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.
- Yulianto dan Veri Junaidi, *Pelanggaran Pemilu 2009 dan Tata Cara Penyelesaiannya*, KRHN kerjasama Yayasan Tifa, Jakarta, 2009.

Disertasi dan Tesis

Khairul Fahmi, *Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif*, Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Andalas, 2010.

Sabilal Rosyad, *Praktik Money Politics Dalam Pemilu Legislatif Di Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 (Studi Sosio-Legal-Normatif)*, Sinopsis Tesis, terpetik dalam http://eprints.walisongo.ac.id/92/1/Rosyad_Tesis_Sinopsis.pdf, (terakhir kali dikunjungi pada 2 Juli 2015).

Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Setelah Perubahan Undang-undang Dasar 1945*.

Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik dalam Membentuk Undang-undang Berkelanjutan di Indonesia*.

Jurnal, Orasi, Makalah, Opini dan Artikel

B. Arief Sidharta, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, dalam Jentera (Jurnal Hukum), “Rule of Law”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004.

Citra Dyah Prastuti, *Bawaslu: Kekacauan Pemilu di 2014 Lebih Parah Ketimbang 2009 Mulai dari soal politik uang sampai kekacauan teknis lainnya*, Minggu, 04 Mei 2014, http://kbr.id/05-2014/bawaslu_kekacauan_pemilu_di_2014_lebih_parah_ketimbang_2009/34569.html, diakses pada 12 Juni 2017.

Hamdan Zoelva, *Instrumen Hukum dan Penindakan Money Politic*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Instrumen Hukum Pencegahan Dan Penindakan Praktik Ilegal Dalam Pemilu 2014 Hanns Seidel Foundation (Hsf) Indonesia-Pusat Studi Hukum Konstitusi (Pshk) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tanggal, 22 Februari 2014, diunduh pada http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/34118878/CATATAN_TERHADAP_PENCEGAHAN_MONEY_POLITICS-libre.pdf?, diakses pada 17 Juni 2017.

Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Orasi Ilmiah pada Wisuda Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2004.

-----, *Penegakan Hukum*, makalah, Terpetik dalam <http://www.docudesk.com>, (terakhir kali dikunjungi pada 20 Juni 2015).

Khairul Fahmi, “Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu (*System for The Crime of Election*)”, (2015) 12:2, *Jurnal Konstitusi*.

KY: *Tujuh Faktor Sebabkan Penegakan Hukum Lemah*, <http://www.antaranews.com>, diakses tanggal 9 Juli 2017.

- M. Abdul Kholiq, *Perspektif Hukum Pidana tentang Fenomena Money Politic dan Korupsi Politik dalam Pemilu*, 2014, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Mewujudkan Pemilu yang Demokratis, Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tanggal 22 Maret 2014.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, Pusat Keadilan Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, makalah, Diunduh pada http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, diakses pada 13 Juni 2017.
- Moh. Mahfud MD., *Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Demokrasi Indonesia*, Bahan Orasi Ilmiah disampaikan dihadapan Rapat Senat Terbuka Universitas Andalas, Padang, 16 Oktober 2008.
- Teknik Analisa Kualitatif*, <http://js.unikom.ac.id/kualitatif/analisis.html> (terakhir kali dikunjungi pada 02 Juli 2015).
- Topo Santoso, “Sistem Penegakan Hukum Pemilu”, (2009), 1:2, Jakarta: Jurnal Pantarei KRHN.
- Veri Junadi, “Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu”, (2009) 6:3, *Jurnal Konstitusi*.
- , “Pidana Pemilu Rawan Dipecondangi”, *Harian Suara Karya*, 14 Nopember, 2008.
- Wirdyaningsih, *Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD dan DPRD 2009*, makalah disampaikan dalam diskusi publik KRHN, Rabu 6 Mei 2009.
- Wiwik Afifah “Tindak Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum - Mimbar Keadilan*, (2014), 1:6.

Kamus

- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rinneka Cipta, Edisi Baru, Jakarta, 2007.
- Tim Redaksi *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan-Keputusan

- “Undang-undang R.I. Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, *Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 53 dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4389*.
- “Undang-undang R.I. Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah”, *Lembaran Negara R.I.* Tahun 2008 Nomor 51 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I.* Nomor 4836.

“Undang-undang R.I. Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”, *Lembaran Negara R.I.* Tahun 2008 Nomor 51 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I.* Nomor 4836.

“Undang-undang R.I. Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum”, *Lembaran Negara R.I.* Tahun 2011 Nomor 101 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I.* Nomor 5246.

“Undang-undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum”, *Lembaran Negara R.I.* Tahun 1986 Nomor 20 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I.* Nomor 3327.

“Undang-undang R.I. Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum”, *Lembaran Negara R.I.* Tahun 2007 Nomor 59 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I.* Nomor 4721.

“Undang-undang R.I. Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman”, *Lembaran Negara R.I.* Tahun 2008 Nomor 8 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I.* Nomor 4358.

“Undang-undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman”, *Lembaran Negara R.I.* Tahun 2009 Nomor 157 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I.* Nomor 5076.

“Undang-undang R.I. Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum”, *Lembaran Negara R.I.* Tahun 2009 Nomor 158 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I.* Nomor 5077.

“Undang-undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kita Undang-undang Hukum Acara Pidana”, *Lembaran Negara R.I.* Tahun 1981 Nomor 76 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I.* Nomor 3209.

“Undang-undang R.I. Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum”, *Lembaran Negara R.I.* Tahun 2012 Nomor 117 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I.* Nomor 5316.

Nota Kesepahaman yang dituangkan dalam Surat Nomor 055/A/JA/2008, No.Pol B/06/VI/2008 dan Nomor 01/BAWASLU/KB/VI/2008, tanggal 27 Juni 2008.

Surat Keputusan Keputusan Jaksa Agung No. 125/2008.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Risalah dan Putusan

Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Asma, tanggal 31 Maret 2009 dan *Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Yusrina*, tanggal 3 April 2009.

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Eliza*, tanggal 31 Maret 2009.
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Mirwan, S.H.*, pada Kepolisian Resor Kota Payakumbuh, tanggal 31 Maret 2009.
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Riswandi Sultan*, pada Kepolisian Resor Kota Payakumbuh, tanggal 29 Maret 2009.
- Berita Acara Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dprd Kota Payakumbuh Periode 2009 – 2014*, tanggal 30 Oktober 2008.
- Berkas Perkara Pidana Reg No.Pol: BP/35/IV/2009/Reskrim*, tanggal 05 April 2009.
- Daftar Barang Bukti, Daftar Saksi-saksi dan Daftar Tersangka Kepolisian Resor Kota Paayakumbuh*, Tanggal 5 April 2009 dalam *Perkara Laporan Polisi No.Pol.: LP/A/01/III/2009/ Resta*, tanggal 28 Maret 2009.
- Kajian Laporan Nomor: 01/PANWASLU-PU/III-2009*, tanggal 27 Maret 2009.
- Kejaksaan Negeri Payakumbuh, Surat Dakwaan NO.REG. PERKARA PEMILU: PDM – 01/PYKBH/0409*, tanggal 13 April 2009.
- Kejaksaan Negeri Payakumbuh, Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B – 82/N.3.12/Ep.1/04/2009*, tanggal 16 April 2009.
- Lampiran Berita Acara Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Payakumbuh Periode 2009 – 2014*, tanggal 30 Oktober 2008.
- Laporan Polisi No.Pol.: LP/A/01/III/2009/Resta*, tanggal 28 Maret 2009.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008*, Tanggal 2 Desember 2008.
- Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 73/Pid.B/2009/PN.PYK*, tanggal 22 April 2009.
- Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 79/PID/2009/PT.PDG*, tanggal 28 April 2009.
- Risalah Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 79/PID/2009/PT.PDG*.
- Surat Penerimaan Laporan Nomor: 03/Lprn/PWS-PU/III-2009*, tanggal 25 Maret 2009.
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 79/PT.PID/2009/PT.PDG*, tanggal 27 April 2009.

Laporan dan Modul

- Bawaslu RI, *Buku Laporan Panwas 2004*.
- , *Laporan Panwaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009*.
- , *Laporan Panwaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009*.
- , *Laporan Sementara Panwaslu Propinsi per 25 Agustus 2009*.